

ORANG LAUT, PERMUKIMAN, DAN KEKERASAN INFRASTRUKTUR¹

Khidir Marsanto Prawirosusanto

Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

E-mail: marsanto.iid@gmail.com

Diterima: 13-10-2015

Direvisi: 4-11-2015

Disetujui: 16-11-2015

ABSTRAK

Artikel ini mendiskusikan hubungan Orang Laut di Kepulauan Riau dengan pembangunan infrastruktur dalam program pemukiman suku-suku terasing oleh pemerintah Orde Baru. Melalui perspektif *governmentality*, kita dapat melakukan refleksi historis dan etnografis. Pada satu pihak, ketersediaan permukiman adalah ihwal bagaimana pemerintah mewujudkan angan-angan kemajuan suatu bangsa di segala lini kehidupan warganya. Pada pihak lain, hal ini memantik sederet persoalan sosial dan kultural dalam kehidupan Orang Laut sebagai komunitas pengembara laut. Dengan adanya program pemukiman, Orang Laut justru terjerumus ke dalam kondisi kemiskinan, ketergantungan, kerentanan, dan ketersingkirkan. Sejumlah konsekuensi negatif inilah yang disebut sebagai kekerasan infrastruktur (*infrastructural violence*). Akar dari sejumlah konsekuensi negatif tersebut terletak pada kekeliruan pemahaman pemerintah mengenai kebudayaan masyarakat berbasis laut yang amat bias dengan perspektif masyarakat berbasis darat. Kebijakan yang dilahirkan untuk menangani masalah-masalah masyarakat kelautan pun pada akhirnya meleset.

Kata kunci: Orang Laut, *governmentality*, program pemukiman, infrastruktur, kekerasan, budaya kelautan.

ABSTRACT

This article discusses the relationship of the nomadic sea tribe, the Orang Laut, in the province of Riau Islands, with an infrastructure development project in a state-organized resettlement area from the New Order era. Using Foucault's concept of governmentality we can reflect on multiple historical and ethnographic points of view. On the one hand, the settlement infrastructure provided by the government aims at materializing the national modernization dreams, of improving the welfare and social-cultural life of citizens. On the other hand, doing this modernization project also caused some socio-cultural problems within the Orang Laut livelihood. Under this Resettlement Program the Orang Laut are subjected to new negative repercussions, such as poverty, dependency, vulnerability, and alienating conditions. This is a form of infrastructural violence. The basic argument of the negative repercussions arisen is the fallacy of the government to understand about maritime people's social system and cultural system, because what they did is based on the 'land-people perspectives' bias. Consequently, they made big mistakes designing policy to improve the quality of living and to resolve problems faced by maritime-base people.

Keywords: *Orang Laut, governmentality, state-organized resettlement, infrastructure, violence, maritime culture.*

¹ Makalah ini merupakan interpretasi lebih lanjut dari sejumlah temuan penelitian etnografis untuk tesis master pada Program Studi S2 Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada pada 2014. Penelitian lapangan saya kerjakan selama tiga bulan (Mei–Juli 2013) di Kepulauan Riau serta penelitian pustaka dan arsip selama enam bulan di Yogyakarta, Batam, dan Tanjung Pinang. Riset ini memungkinkan karena dukungan program *In Search of Balance* Batch 1 tahun 2013, kerja sama Universitas Gadjah Mada (Indonesia) dan the University of Agder (Norwegia). Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga Orang Suku Laut yang menerima saya dengan persahabatan, Dr. Pujo Semedi H.Y., M.A. (Ketua Program ISB dan Dekan FIB), Dr. Agus Suwignyo, M.A. (Ketua Pengelola Harian ISB) serta kepada pembimbing saya, Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra, M.A., M.Phil.

Tulisan ini mendiskusikan sejumlah fakta etnografis dan historis mengenai perubahan beberapa aspek sosial dan budaya kehidupan sehari-hari Orang Laut. Orang Laut adalah sebutan untuk komunitas pengembara laut² di Kepulauan Riau (Kepri) dalam kaitannya dengan infrastruktur-permukiman³. Perubahan ini dipicu dua hal. *Pertama*, orientasi ekonomi pemerintah Indonesia yang semakin terbuka (*a laissez-faire economy*) bagi aktor-aktor ekonomi global sejak Orde Baru (Chou & Wee, 2002; Ong, 2005, 2006; Wee & Chou, 1997). Untuk merespons hal tersebut, pada medio 1980-an, Indonesia bersama Singapura dan Malaysia merancang *Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle* (IMSGT) atau yang lebih populer disebut segitiga emas Sijori (Singapura, Johor, dan Riau). Dalam kelanjutan agenda ini pula pemerintah Otorita Batam diciptakan untuk mengawal pengembangan Kota Batam (yang kala itu masih bagian dari Provinsi Riau) sebagai kota industri dan perdagangan bebas (Chou, 1997, 2010; Chou & Wee, 2002; Mubyarto, 1997).

Ambisi pemerintah membangun area khusus industri dan perdagangan bebas di Batam mutlak memerlukan ketersediaan infrastruktur bagi para penanam modal. Misalnya membangun kawasan industri untuk mendirikan pabrik, pembangkit listrik, biro penyalur tenaga kerja murah, pelabuhan bongkar muat kapal peti kemas raksasa, gedung perkantoran, sampai klaster-klaster permukiman ekspatriat. Itu semua menunjukkan bahwa upaya pemerintah Indonesia ditujukan untuk melayani para pemodal global (Ong, 2005, 95). Pembangunan infrastruktur industri diklaim bukan hanya sebagai jalan meningkatkan ekonomi bangsa, tetapi juga berfungsi menaikkan citra kemajuan negara Indonesia di mata negara lain. Hal itu diasumsikan berefek-samping juga pada

peningkatan kesejahteraan dan taraf kehidupan penduduk asli Pulau Batam dan sekitarnya⁴.

Untuk urusan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup, pemerintah menggarap sejumlah program yang disesuaikan dengan derajat (kelas) dan subjek sasarannya. Salah satu program yang akan dibahas di sini adalah yang ditujukan bagi warga negara yang dipandang sebagai kaum terbelakang atau tertinggal (Colchester, 1986; Mubyarto, 1997; Wee & Chou, 1997). Pemerintah secara khusus mencanangkan program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKMT) di Batam dan sekitarnya (Lenhart, 2002; Chou, 1997, 2010; Mubyarto, 1995, 1997), yang diterapkan juga di sejumlah wilayah di Indonesia (Colchester, 1986; Dove, 1985; Haba, 2002; Li, 2012). Sensus Departemen Sosial yang mencatat ribuan orang sebagai komunitas pengembara laut hidup di perairan Kepri saat itu mendasari pemikiran bahwa PKMT perlu segera dikerjakan (Chou, 2010, 4). Melalui PKMT dan dalih pembangunan nasional, pemerintah berupaya mengubah sebagian pola hidup komunitas *seafaring* dengan jalan mendaratkan mereka di sejumlah pulau yang telah disiapkan infrastrukturnya. Inilah yang menjadi pemicu perubahan *kedua*.

Diskusi dalam tulisan ini berasal dari penelitian saya pada 2013 lalu di Pulau Bentam⁵, sebuah pulau kecil di sisi barat Pulau Batam, Kepri. Pulau Bentam dihuni tidak lebih dari 40 kepala keluarga, dan diapit oleh dua pulau kecil lain. Pulau ini pernah menjadi bagian dari program PKMT, pulau yang direka sedemikian rupa oleh pemerintah sebagai tempat bermukim dan berlatih sejumlah komunitas (klan) Orang Laut yang tersebar di sejumlah titik di Kepri (Prawirosusanto, 2014). Tujuannya agar mereka *menjadi* seperti warga Indonesia pada umumnya

² Seperti dijelaskan oleh Chou (2010) bahwa penyebutan atas komunitas pengembara laut ini bermacam-macam, tetapi sapaan yang paling sering saya dengar ialah Orang Suku Laut atau Orang Laut. Mereka cenderung menyebut diri mereka sendiri sebagai Orang Laut atau Suku Laut.

³ Istilah yang perlu digarisbawahi ialah permukiman dan pemukiman karena secara morfologis agak mirip, tetapi memiliki makna berbeda. Dalam KBBI, permukiman merujuk pada tempat atau lokasi seseorang bermukim atau menetap, sedangkan pemukiman ialah proses seseorang bermukim.

⁴ Konfigurasi penduduk berdasarkan suku-bangsa di Kepulauan Riau, utamanya Pulau Batam (Kota Batam) dan Pulau Bintan (Kota Tanjung Pinang) didominasi oleh Melayu-Riau Kepulauan yang berbeda dengan Melayu-Riau Daratan, yaitu lebih dari 75%. Akan tetapi, kasus Pulau Batam, seiring dengan industri yang tumbuh pesat di Batam sampai sekitar tahun 2000, konfigurasi ini berubah. Persentase orang Jawa hampir menyamai orang Melayu-Riau Kepulauan, yaitu 25,51% berbanding 26,53% (Ananta, Arifin & Bakhtiar, 2008, 37).

⁵ Semua nama informan dalam tulisan ini *pseudonym* atau alias. Begitu juga dengan nama pulau tempat saya melakukan penelitian etnografi.

(Lenhart, 1997; Colchester, 1986). Dari sinilah epifani kehidupan Orang Laut. Mereka mulai berubah seiring pembangunan, tidak lagi *zeenomaden*—hidup mengembara dengan sampan di lautan bebas, dan tidak pula melakukan aktivitas ekonomi secara subsisten (*Kompas*, 23 Februari 2013). Mereka terus hidup dalam paradoks; hendak menjadi manusia “modern” atau bertahan dalam tradisi moyang mereka dengan segala konsekuensinya (Bettarini, 1991; Chou, 1997, 2010; Lenhart, 1997, 2002; Prawirosusanto, 2014; Trisnadi, 2002). Fakta ini tidak datang begitu saja, melainkan konsekuensi dari proses sosial-politik dan sejarah yang panjang, yang membawa (atau memaksa) mereka berubah dari pola hidup tertentu ke pola hidup lain. Perubahan inilah yang pada gilirannya melahirkan kesadaran baru dalam komunitas mereka, yakni kesadaran “Orang Laut yang mendarat” (lihat Prawirosusanto, 2014, 217–226).

Dinamika kisah hidup Orang Laut tersebut tidak lain akibat campur tangan sejumlah aktor yang berkuasa (pemerintah dan para agennya) yang mengubah realitas kehidupan warganya demi sebuah mitos pembangunan (Rahardjo, 1986). Sebagaimana pendapat Wee dan Chou (1997), “(state) power is the authority to define and thereby shape realities is also the power to make history and create discourse.” Wajar bilamana wacana pembangunan suatu bangsa dan bagaimana hal itu diterjemahkan dalam kenyataan hingga saat ini masih ditentukan penuh oleh pemerintah. Dalam kasus Orang Laut yang telah bermukim di Pulau Bentam, otoritas pemerintah itu mewujudkan dalam campur tangan mereka terhadap arah perubahan sosial masyarakat lokal dan komunitas “suku terasing”.

Di sini, saya akan menguraikan mengapa upaya pemerintah mengubah dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Orang Laut mengalami kegagalan. Padahal sebagai permukiman, Pulau Bentam dibangun dengan infrastruktur dan fasilitas yang relatif lengkap, yaitu gedung sekolah, tempat ibadah (masjid), posyandu dan rumah petugas kesehatan, gedung pertemuan warga, area bermain anak, area berolahraga, sejumlah petak tanah bercocok-tanam, sejumlah sumur sumber air tawar dan bilik mandi, panel surya (alat penangkap panas sinar matahari penghasil listrik),

pelabuhan sederhana, dan tentu saja permukiman warga di muka pantai (Prawirosusanto, 2014, 62). Tak hanya itu, sejumlah bantuan berupa tenaga kesehatan, peralatan kerja laut dan darat serta sejumlah pelatihan keterampilan kerja dan kerajinan bagi warga Bentam juga tak jarang diselenggarakan (Bettarini, 1991, 10–11). Di Pulau Bentam juga dibangun Monumen Sampan. Fungsinya bukan sebagai sarana pengingat masa lalu warga Bentam, tetapi lebih pada penanda keterbelakangan komunitas ini—yang telah mereka sepakati untuk ditinggalkan.

Hingga kini, Orang Laut penerima uluran tangan negara itu justru terjebak dalam kemiskinan, ketergantungan, dan keterbelakangan baru—yang jauh dari angan-angan pemerintah ihwal kondisi kehidupan layak dan mandiri pascapemukiman. Kehidupan sehari-hari yang layak menurut pemerintah tak lain adalah “kehidupan modern” dengan ketersediaan sejumlah fasilitas dan infrastruktur di sekitar mereka (Prawirosusanto, 2014, 31–73). Dengan demikian, kita bisa menduga hal ini sebagai wujud “*regimes of living*” (Jiménez, 2008, 16) pemerintah berupa standardisasi kelayakan hidup warganya agar mereka “menjadi lebih beradab”.

GOVERNING (“MENGATUR” DAN “MENERTIBKAN”) ORANG LAUT

Untuk menjawab persoalan tersebut, saya memakai dua konsep analisis. *Pertama*, *governmentality* yang digagas Foucault (1991). Selama lebih dari satu dekade terakhir, para ahli antropologi telah mengembangkan prosedur analisis etnografi dengan konsep ini untuk menjelaskan struktur sistem relasi kuasa di balik berbagai fenomena sosial-budaya dan ekonomi-politik dunia modern dan pascakolonial (Appadurai, 2002; Ferguson, 2009; Ferguson & Gupta, 2005; Gibbins & Taylor, 2010; Li, 2007, 2012; Ong, 2005; Scott, 2005). *Kedua*, infrastruktur dalam sudut pandang antropologi. Beberapa tahun terakhir muncul kelompok ahli antropologi (umumnya ahli antropologi urban) yang mencoba memahami berbagai gejala perubahan kebudayaan dan ekonomi-politik melalui fenomena material infrastrukural (contohnya pembaruan energi, teknologi komunikasi, transportasi, perairan,

permukiman, dan sebagainya). Fenomena tersebut tak melulu dilihat dari aspek fungsionalnya (*technical*), melainkan juga pada ranah pertarungan politik makna ataupun politik praktis (*technopolitics*), terutama terkait bagaimana bentuk-bentuk kehidupan modern diwujudkan (Larkin, 2013).

Lantas, sejauh mana kedua konsep itu relevan dalam eksplanasi fenomena perubahan sosial-budaya Orang Laut? Keduanya menekankan kata kunci yang sama, yakni “*being modern*”, dan bagaimana kehidupan manusia itu diarahkan dalam koridor modernitas. Gagasan mengenai modern ini jelas tidak bebas nilai atau mengandung logika politik tertentu. Hanya saja, setiap konsep bekerja pada tataran analisis yang berbeda. Di sini, analisis *governmentality* menasar pada tataran bagaimana gagasan atau logika politik (*political rationalities*) mengenai pembangunan nasional (modernisasi dan pemberadaban) dirancang sedemikian rupa dan diimplementasikan melalui salah satu program pemukiman komunitas suku terasing. Konsep ini bermanfaat pula untuk mengidentifikasi siapa saja agen yang *bekerja* dalam proses ini (aparatus). Dari sini, dimensi hubungan-hubungan kekuasaan (*power relations*) dan aparatusnya bisa dijelaskan.

Jika sepakat dengan Foucault (1991), kita bisa menyebut upaya pemerintah mengatur berbagai aspek kehidupan warganya sebagai *the art of government*. Gordon (1991) menafsirkannya sebagai “*governmental rationality*” atau dengan kata lain, “*the conduct of conduct*” yang dilakukan dengan cara “... *calculated and systematic ways of thinking and acting that aim to shape, regulate, or manage the comportment of others*” (Inda, 2005, 1). Ini merupakan gagasan tentang kekuasaan yang bertujuan menata, mengatur, menertibkan, dan mengendalikan individu-individu dalam masyarakat sesuai dengan kehendak penguasa. Foucault menerangkan jika sekelompok manusia hidup di dalam teritori negara, otomatis mereka akan menjadi target objek kekuasaannya. Meski begitu, ada yang lebih penting bagi negara daripada sekadar menguasai, yaitu *efek relasi mereka dengan sesuatu (things)* (Foucault, 1991, 93, penekanan dari saya). Premis

ini membawa kita untuk tidak hanya mendiskusikan siapa menguasai siapa, tetapi juga mengenai apa yang terjadi ketika siapa menguasai siapa dan dalam hubungannya dengan apa (sesuatu).

Relasi manusia dengan sesuatu tersebut dapat diamati dalam keseharian karena sifatnya empiris, seperti relasi manusia dengan lingkungan fisik (alam), dengan infrastruktur, dengan kesehatan, dengan sumber-sumber ekonomi, dengan pranata-pranata sosial, dan dengan organisasi sosial. Dalam pandangan Foucaultian, hubungan-hubungan semacam ini harus diatur (“*being governed*”) oleh negara, “... *that men and things be administered in a correct and efficient way*” (Inda, 2005, 4), dengan derajat pendisiplinan dan cara-cara yang disadari maupun tidak (Ferguson & Gupta, 2005, 114) demi “kebaikan” hidup mereka (Scott, 1998a, 1998b). “Kebajikan” di sini, tentu saja dalam sudut pandang penguasa, dihasilkan lewat instrumen dan infrastruktur tertentu yang dirancang untuk peningkatan kemakmuran, perbaikan keadaan hidup, perbaikan kesehatan, peningkatan praktik keagamaan, dan sebagainya (Foucault, 1991, 100; Scott, 1998). Dengan demikian, *governmentality* menyediakan satu sudut pandang untuk menerangkan dan memahami bagaimana model kekuasaan dirancang, dijalankan, dan dalam hubungan seperti apa negara mengharapkan masyarakat tercipta.

Dalam kasus Orang Laut, dimensi analisis *governmentality* negara sebetulnya sudah mengemuka dalam sejumlah studi yang berbicara soal pembangunan dan kebijakannya. Hampir semuanya menyimpulkan negara secara subtil menerapkan pembangunan tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat, dan tampaknya negara terlalu larut dalam gegap-gempita percaturan ekonomi global (Chou, 1997, 2010; Chou & Wee, 2002; Lenhart, 1997, 2002; Mubyarto, 1997; Prawirosusanto, 2014; Wee & Chou, 1997). Akan tetapi, belum ada kajian yang secara khusus menafsirkan hubungan gejala infrastrukural dengan keseharian Orang Laut di Indonesia. Terlebih, belum ada kajian membahas efek pengaturan dan penertiban Orang Laut dalam konteks pembangunan infrastruktur sebagai basis program pemukiman tahun 1980-an (cf. Prawirosusanto, 2014).

Jika *governmentality* berguna untuk menguak logika politik di balik pembangunan, analisis infrastruktur lebih menekankan sejauh mana *governmentality* dipraktikkan dan diwujudkan secara konkret atau fisik (*infrastructural*) (Harvey, 2015; Larkin, 2015). Ini menunjukkan adanya titik temu analisis kedua konsep tersebut dalam memotret realitas di mana analisis *governmentality* berangkat dari “atas-abstrak-gagasan”, sedangkan analisis infrastruktur berangkat dari “bawah-konkret dan permukaan-material”. Hal-hal yang konkret adalah yang dapat dirasakan secara langsung dengan segenap indra manusia (Larkin, 2013; Schwenkel, 2015). Buck-Morss (1992) seperti dikutip Larkin (2013), menerangkan bahwa infrastruktur merupakan “...a form of cognition, achieved through taste, touch, hearing, seeing, smell”. Melalui infrastruktur inilah kita disadarkan pada hal-hal fisik bernuansa modern dan maju melalui seperangkat sensoris tubuh kita—termasuk nalar manusia (Larkin, 2013, 337). Oleh karena itu, “*infrastructures are a mixture of political rationality, administrative techniques, and material systems, and ... is not in infrastructure per se but in what it tells us about practices of government*” (Collier, 2011 dalam Larkin, 2013, 331). Singkat kata, hubungan-hubungan manusia dengan infrastruktur menjelaskan *governmentality* itu sendiri. Analisis infrastruktur tidak hanya untuk melihat hal-hal yang di permukaan saja, tetapi juga sebagai pintu masuk menjelaskan ideologi di balik alasan, pertimbangan, dan pemikiran mengapa pemerintah orde baru harus membangun permukiman di Pulau Bentam; sejak program pemukiman dirancang, dikerjakan, ketika permukiman dan segenap fasilitasnya terselesaikan, hingga seperti apa konsekuensi sosial-kulturalnya hari ini sebagai akibat proses tersebut. Dimensi perubahan sosial (misalnya perilaku) dan kebudayaan (seperti cara pandang, *pemaknaan*) akan diungkap melalui elemen-elemen material sekaligus infrastruktur itu.

Analisis infrastruktur memungkinkan kita memahami logika politik di balik pembangunan dari gejala empiris. Saya setuju dengan Larkin mengenai infrastruktur sebagai *technopolitics* yang sama-sama mengilhami pandangan Foucault, “*infrastructures ... reveal forms of political*

rationality that underlie technological projects and which give rise to an ‘apparatus of governmentality’” (Larkin, 2013, 328). Ini membawa kita agar tidak lagi terjebak pemikiran bahwa yang disebut *apparatus* dari *governmentality* hanyalah agen (*human*), melainkan juga infrastruktur (*non-human, things*). Dalam analisis, infrastruktur perlu diletakkan sebagai “*a concrete semiotic and aesthetic vehicles*” (Larkin, 2013, 329) untuk dapat memahami pemaknaan masyarakat atas infrastruktur tersebut (*as a semiotic object*).

Sebagai objek semiotik yang nyata-ada (*concrete*) dan bahwa pandangan memaknai gejala infrastruktur ini tidak bisa serta-merta hanya ditujukan untuk mengungkap yang tampak—*infrastructures are not simply “out there”*, infrastruktur adalah juga sebuah sistem lambang atau simbol (Larkin, 2013, 329–330). Sistem simbol dalam perspektif Saussurean, menurut Ahimsa-Putra, terdiri atas dua aspek, yaitu lambang (*symbol*) dan linambang (*symbolized*) (Ahimsa-Putra, 2002). Ini memungkinkan kita memaknai Pulau Bentam sebagai *lambang* dari ambisi pembangunan nasional semasa Orde Baru, berupa area permukiman dengan sistem infrastruktur-fisik yang konkret dan empiris. Sementara itu, linambang (*symbolized*) dari Pulau Bentam adalah ideologi tertentu, sistem relasi kuasa tertentu. Ideologi di sini kurang lebih berkaitan dengan gagasan mengenai corak kehidupan modern. Menurut Walter Benjamin (dalam Larkin, 2013, 329), infrastruktur merupakan representasi (linambang) *the collective fantasy of society*, fantasi kolektif suatu masyarakat. Makna yang dilekatkan atas simbol tertentu itu bebas belaka, mana-suka (*arbitrer*), sangat bergantung pada mereka yang memaknai. Bisa saja, tafsir yang muncul meleset jauh dari makna yang diharapkan oleh pihak pembuat simbol itu. Namun, bisa juga sebaliknya. Secara tidak langsung, artikel ini juga menunjukkan politik representasi dari sistem infrastruktur di Pulau Bentam. Kendati pembangunan infrastruktur umumnya dilihat sebagai representasi kuasa pemerintah atas warganya, efek politik proyek pembangunan seperti ini tidak bisa dengan serta-merta dibaca (dianalisis dan disimpulkan) dari fenomena permukaannya saja (Larkin, 2013, 334).

Terakhir, masalah *infrastructural gap* mengemuka ketika sekelompok manusia yang hidup dalam sistem infrastruktur tertentu tidak siap menghadapi teknologi baru yang secara kultural bukan tradisinya—atau dalam istilah Bourdieu bukan habitus-nya. Konsekuensi dari perbedaan cara memaknai sekaligus memperlakukan hal-hal material (*materiality*) inilah yang memungkinkan munculnya kekerasan infrastruktur yang tidak disadari (Rogers & O’Neill, 2012), yang boleh jadi tidak disadari oleh kedua belah pihak. *Infrastructural gap* di sini terjadi karena terdapat perbedaan imaji tentang masyarakat ideal antara pemerintah dan bayangan komunitas Orang Laut.

POLITIK PENCIPTAAN PULAU BENTAM DAN PEMUKIMAN ORANG LAUT

Klaim negara sebagai rasionalisasi pembangunan nasional dalam tujuan mencetak manusia Indonesia baru ialah:

“Hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat bangsa Indonesia termasuk di dalamnya *masyarakat terasing berhak menikmati hasil pembangunan dan turut serta dalam kegiatan pembangunan.*” (DBMT, 1994/1995: 1, cetak miring penekanan saya).

Teks tercetak miring tersebut secara tersurat menunjukkan bahwa dengan jelas negara memiliki ide tentang stratifikasi sosial tertentu. Menurut negara, “masyarakat terasing” menempati posisi terbawah dalam struktur sosial seluruh populasi warga negara. Mereka yang digolongkan sebagai “masyarakat terasing” ialah mereka yang dianggap tertinggal dari segi tingkat pendidikan, kualitas kesehatan, kondisi dan lokasi tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan sebagainya daripada umumnya warga Indonesia. Pandangan seperti ini cukup problematis (Prawirosusanto, 2014, 34–40). Sebagaimana saya singgung pada awal tulisan, Orang Laut di Kepri termasuk kategori ini. Program pembinaan masyarakat terasing diciptakan pemerintah melalui Departemen Sosial

(Depsos) untuk mengatasi persoalan-persoalan itu.

Dalam sejumlah dokumen Direktorat Bina Masyarakat Terasing (DBMT), Departemen Sosial, mekanisme pelaksanaan program pemukiman dan pembinaan Orang Laut di sekitar Kota Batam mengacu pada kebijakan nasional tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing (PKMT) (DBMT, 1987b, 1987c, 1988a). Program ini dirancang secara terpadu dengan rencana induk Pembangunan Daerah Industri Pulau Batam (DIPB) pada penghujung 1970-an.⁶ Strategi ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan proyeksi Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan bebas (Chou, 2010; Chou & Wee, 2002). DBMT sebagai penanggung jawab program PKMT terhadap Orang Laut di Batam kemudian menerbitkan buku *Pola Operasional atau Pola Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing*, yang berisi lima tahapan program, yakni pra-persiapan, persiapan, pembinaan, terminasi, dan bina purna (DBMT 1987b, 1987c, 1988a). Penyiapan infrastruktur menjadi menu utama dalam setiap tahapan pembinaan. Semua tahapan itu dikerjakan oleh koordinator wilayah Kotamadya Batam dan Forum Komunikasi dan Konsultasi Sosial (FKKS) Kodya Batam. Keseluruhan proses ini memakan waktu sekitar tiga tahun (Prawirosusanto, 2014, 47–51).

Merekonstruksi riwayat Orang Laut bermukim di Bentam dalam program PKMT banyak berasal dari penuturan lisan pengalaman orang Bentam. Hanya sedikit sumber yang menceritakan detail periode awal pemukiman, termasuk dalam surat kabar dan beberapa dokumen FKKS. Namun dari seluruh informasi, proses awal peralihan hidup mengembara ke hidup menetap Orang Laut adalah dibangunnya area perkampungan serta rumah-rumah tinggal oleh pemerintah dan non-pemerintah (FKKS).

Kendati demikian, sebelum pemerintah turun tangan secara penuh dalam program PKMT

⁶ DIPB ditetapkan oleh Keputusan Presiden No. 41/1973 tentang pengembangan daerah industri. Kepres No. 33 Tahun 1974, Kepres No. 45 Tahun 1978, dan Kepres No. 56 Tahun 1985 menyempurnakan peraturan sebelumnya tentang perluasan bonded area atau duty-free zone (Lenhart, 1997, 581) dalam wilayah Otorita Batam (DBMT, 1987b, 1988a).

pada 1980-an, terdapat pihak perorangan yang telah merintis permukiman Orang Laut. Semua Orang Laut generasi pertama di Bentam yang saya temui menyebutkan Soentaram—petinggi Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) dan pensiunan pejabat Kantor Bea dan Cukai Pulau Batam, yang berandil besar “menyadarkan” mereka untuk meninggalkan cara hidup mengembara agar hidup lebih layak dan mendapat berbagai kemudahan akses status kewarganegaraan, pelayanan kesehatan, permukiman, layanan agama, akses pendidikan (bisa baca-tulis), dan akses bantuan lain dari pemerintah (Prawirosusanto, 2014, 52–60). Pada 1987, pemerintah mengklaim beberapa kelompok Orang Laut—yang ikatan kekerabatannya berdekatan—di sekitar Pulau Boyan sampai Pulau Buluh, menyatakan kesediaannya untuk bermukim di Pulau Bentam. Jauh sebelumnya, Pulau Bentam merupakan satu dari 106 pulau yang tak berpenghuni. Bentam dipilih sebagai salah satu tempat yang disiapkan Departemen Sosial bersama FKKS untuk memukimkan sejumlah klan Orang Laut yang telah “sadar” dan menyatakan kesediaannya kepada Soentaram.

Sesuai dengan persyaratan dalam buku panduan pemerintah, penetapan Pulau Bentam didasarkan atas sejumlah pertimbangan, di antaranya ketersediaan sumber air bersih (air tawar) dan memiliki lahan relatif subur. Dalam perjalanannya, upaya pemerintah menggerakkan Orang Laut untuk bercocok tanam buah-buahan atau sayur-mayur tidak pernah berhasil. Penyebabnya ada dua hal. Pertama, tanahnya tidak mendukung untuk menanam buah dan sayur, hanya cocok untuk ketela. Kedua, Orang Laut



Sumber: (Foto Reproduksi Koleksi Mahadan)

Gambar 1. Proses Pembangunan Permukiman Orang Laut di Bentam pada akhir 1980-an

memilih melakukan aktivitas ekonominya di laut, yakni berburu ikan. Hanya laut yang mampu memberi penghidupan terbaik bagi mereka (Prawirosusanto, 2014, 100). Dalam pandangan saya, Bentam dipilih karena lokasinya yang tidak jauh dari pusat kekuasaan (Kota Batam). Dapat dicapai tidak sampai 10 menit dari pelabuhan Sekupang, Batam, dengan perahu *pompong*. Di Sekupang pulalah kantor FKKS berada.

Penyiapan infrastruktur Bentam untuk lokasi permukiman Orang Laut sebetulnya sudah dimulai Soentaram pada 1985. Saat itu, ia membangun sebuah perkampungan yang dilengkapi rumah panggung dari papan kayu, balai pertemuan, tempat mandi cuci kakus, dermaga, dan fasilitas olah raga. Dalam membangun permukiman itu, Orang Laut calon penduduk Bentam dilibatkan, dibantu beberapa tukang dari Batam. Model bangunan rumah adalah rumah panggung yang menjorok ke laut, mirip seperti pondokan atau *sapao* (gubuk) (Sembiring, 1993, 330), rumah yang biasa dipakai Orang Laut saat berlabuh sementara kala cuaca buruk.

Sejak 1987, pengelolaan Pulau Bentam untuk meningkatkan kesejahteraan sosial Orang Laut berpindah tangan dari Kosgoro kepada pihak FKKS dan beberapa yayasan lain. FKKS adalah yayasan yang dipimpin oleh Sri Soedarsono-Habibie, istri Soedarsono kepala *Batam Industrial Development Authority* atau Otorita Batam. (Yayasan NEBA, 1988; Sembiring, 1993, 342; Soedarsono, 1992). Menteri Sosial kala itu menegaskan bahwa dalam kurun waktu 1987 sampai 1992, pihak FKKS-lah yang sepenuhnya bertugas membina warga Orang Laut di wilayah Pulau



Sumber: Foto Reproduksi Koleksi Mahadan

Gambar 2. Permukiman Orang Laut di Bentam pada awal 1990-an

Tabel 1. Pembangunan Infrastruktur dan Pembinaan Suku Laut di Pulau Bentam Tahun 1985–1999

TAHAPAN PROYEK	AGEN	TAHUN	KEGIATAN / PROGRAM KERJA
Tahap Pra-Persiapan	Soentaram (Kosgoro, Bea Cukai Batam, Otorita Batam)	1985–1986	<ul style="list-style-type: none"> • Pembebasan tanah Pulau Bentam • Penyiapan lahan permukiman • Penyiapan infrastruktur awal permukiman
Tahap Persiapan	Soentaram, FKKS, dan Depsos	1987	<ul style="list-style-type: none"> • Motivasi dan pendaftaran calon pemukim • Studi kelayakan dan pembuatan buku pedoman dari hasil seminar • Penyiapan area permukiman oleh warga Suku Laut sebagai calon penghuni • Penyiapan tenaga kerja dan warga Suku Laut
Tahap Pembinaan, Pembangunan dan Pengembangan Sarana Fisik (pembangunan permukiman dimulai pada HUT FKKS ke-2, 4 April 1988)	FKKS dan Depsos	1987– 1988	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan 14 rumah sederhana layak huni tipe 32 m² • Pembuatan dermaga sederhana sepanjang 100 m • Pembangunan sarana MCK <p>Program Bimbingan Mental, Sosial, dan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan hidup bermasyarakat • Bimbingan hidup kesadaran beragama • Bimbingan pemeliharaan kesehatan diri maupun lingkungan • Bimbingan dalam pertanian, peternakan, dan perikanan
		1988	<p>Program Bimbingan Mental, Sosial, dan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan penyuluhan tentang makanan bergizi dan KB • Bimbingan untuk mengikuti pendidikan formal maupun non-formal bagi orang dewasa dan anak
		1989	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan 3 kelas SD semi permanen lokal seluas 48 m² • Pembangunan Posyandu Budi Kemuliaan 20 m² • Pembangunan Monumen Perahu Suku Laut • Pembangunan masjid seluas 48 m² • Pembuatan jalan setapak keliling kompleks sepanjang 500 m • Memberikan bantuan pompong sebanyak 6 buah
		1990	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan sarana bermain dan olah raga untuk anak-anak dan orang dewasa • Pembangunan 5 rumah tipe 28 m² • Pembangunan ruang serba guna seluas 36 m² • Pemasangan listrik tenaga surya bagi perumahan dan sarana yang sudah ada • Semenisasi jalan setapak sepanjang 150 m <p>Program Bimbingan Mental, Sosial, dan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budi daya rumput laut • Mengenal penggunaan uang melalui simpanan pada Bank Rakyat Indonesia • Mengenal keterampilan masak-memasak, menjahit, dan sebagainya
		1991	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan yetti sepanjang 100 m dan pelantar 18 m² • Penambahan sarana listrik untuk rumah-rumah yang belum terpasang
1992	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan 3 ruang SD lokal dan MSK untuk anak sekolah • Mengadakan perbaikan sarana sekolah, rumah, posyandu, dan lain-lain secara gotong-royong • Pembuatan tanggul sepanjang 515 meter pencegah erosi • Pembuatan sarana perbaikan sampan (dok) 		

TAHAPAN PROYEK	AGEN	TAHUN	KEGIATAN / PROGRAM KERJA
Tahap Terminasi	FKKS		Tidak ada Keterangan
Tahap Bina Purna	FKKS, PMI Batam, dan <i>Raleigh International Singapore</i>	1998	(lima tahun pasca-diserahkan kepada pemerintah daerah) <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan sumber air bersih dan MCK • Perbaikan 1 monumen suku laut • Pembangunan 1 poliklinik • Perbaikan bangunan Sekolah Dasar • Perbaikan sarana olah raga dan bermain anak-anak • Perbaikan masjid dan ruang serba guna
	FKKS, Otorita Batam, dan Yayasan NEBA	1999	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan tempat tinggal Suku Laut 10 buah • Penggantian atap rumah dari atap getah menjadi seng • Penggantian tiang-tiang rumah yang rusak • Pembuatan dua keramba (kelong) ikan.

Sumber: Bettarini (1991); K3S Batam (2008); dan Soedarsono (1992).

Batam (Soedarsono, 1992, 1). Masih dengan dana pemerintah, yayasan ini merancang perbaikan pengelolaan permukiman Pulau Bentam dan pada Desember 1988 selesailah dua belas unit rumah untuk empat belas keluarga (lihat Gambar 1 & 2). Di bukit pulau ini juga didirikan bangunan yang berfungsi sebagai sekolah dan ruang pertemuan, serta mushola. Selain itu, FKKS juga membangun dua bak penampung air tawar, kendati telah dibangun beberapa sumur.

Setelah lima tahun, FKKS berhasil menyulap Pulau Bentam yang tadinya tidak berpenghuni menjadi sebuah kampung dengan berbagai fasilitasnya yang dihuni 30 kepala keluarga. Peresmian Pulau Bentam adalah perayaan keberhasilan pembangunan infrastruktur yang terdiri dari 14 rumah sederhana berukuran 32 m², 21 rumah sederhana berukuran 28 m², 1 posyandu seluas 20 m², 1 bangunan SD dengan 6 tempat belajar seluas 96 m², 1 masjid seluas 48 m², 1 ruang serba guna seluas 36 m², 1 buah monumen seluas 16 m², 2 buah sarana air minum dan mandi, 1 buah yetti sepanjang 250 m dan pelantar seluas 18 m², jalan setapak 150 m yang telah disemen, jalan lingkar sepanjang 500 m, dan panel-panel listrik tenaga surya untuk semua rumah dan sarana lainnya. Permukiman ini diresmikan secara langsung oleh Harmoko, Menteri Penerangan zaman Presiden Suharto (1983–1997). Acara ini diliput dan disiarkan oleh TVRI Nasional ke seluruh penjuru negeri. Ini menunjukkan negara ingin kabar keberhasilan kemajuan infrastruktur

pada masa itu diketahui oleh semua pihak dan semua warga negara. Hal itu penting pula secara politis untuk menunjukkan kesiapan Indonesia masuk Era Lepas Landas sebagai bagian Pembangunan Lima Tahun (Pelita) V dan Pembangunan Jangka Panjang Tahan (PJPT) II. Peresmian oleh Harmoko dan disiarkan secara nasional oleh TVRI berasosiasi dengan isu infrastruktur lain, yaitu telekomunikasi berupa Satelit Palapa milik Indonesia yang telah diluncurkan pada 1976. Hanya dengan Satelit Palapa, kita dapat menyaksikan peristiwa-peristiwa yang dianggap penting oleh negara melalui layar kaca (Barker, 2005), seperti halnya peresmian kampung Orang Laut ini. Bagi Orde Baru, tidak peduli apakah cakupan proyek tersebut hanya tingkat lokal atau nasional, selama dapat diklaim sebagai bagian



Sumber: Foto reproduksi dokumen FKKS

Gambar 3. Harmoko (kanan dengan baju safari) dan Sri Soedarsono (tengah dengan baju putih dan merah muda) meresmikan permukiman Orang Laut

dari proyek pembangunan nasional maka perlu dirayakan dan dikabarkan (Barker, 2005, 709).

Sri Soedarsono mengatakan apa yang dilakukan dalam lima tahun tersebut adalah penerjemahan dari buku pedoman pemukiman dan pembinaan terhadap komunitas Suku Laut tahun 1987 (DBMT 1987a, b, c, d). Untuk Posyandu atau penanganan kesehatan di Bentam, Rumah Sakit Budi Kemulyaan Batam menjadi penanggung jawab, baik ketersediaan tenaga kesehatan maupun obat-obatan. Sementara itu, SD Bentam khusus bagi anak-anak Orang Laut dikelola Yayasan Keluarga Batam (YKB)—yayasan yang juga menaungi beberapa sekolah swasta unggulan di Kota Batam, seperti TK, SD, dan SMP Kartini milik Sri Soedarsono. FKKS juga menyediakan prasarana sekolah (buku pelajaran dan buku tulis) hasil sumbangan dari berbagai pihak, seperti Belanda dan Singapura. Untuk pembinaan keagamaan, FKKS menyerahkan pada Dinas Agama dan sejumlah yayasan gereja. Untuk urusan pencarian donatur non-dana pemerintah, dikerjakan oleh YPAB (Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda) Batam, sebuah organisasi nirlaba dan berafiliasi dengan YKB. YPAB kemudian mendapat sponsor dari Yayasan NEBA (Stichting Nederland-Batam) untuk proyek pembangunan sarana kesehatan serta pembinaan dan pelayanan kesehatan di Bentam (Soedarsono, 1992).

Uraian di atas menunjukkan FKKS dan Departemen Sosial mengawal semua proses bermukimnya Orang Laut di Bentam, sejak tahap pra-persiapan hingga tahap pembinaan dan pengembangan. Merujuk Tabel 1, setelah lima tahun proyek PKMT berlangsung (1987–1992), Tahap Terminasi dilakukan pada 1993. Pada tahun ini, Kampung Bentam dinilai telah memenuhi syarat minimal sebagai permukiman yang layak. Orang Laut di kampung ini juga dinilai sudah mampu berlaku sebagai warga negara yang mandiri (DBMT 1988a, 16) dan seperti “warga negara Indonesia pada umumnya”. Oleh sebab itu, FKKS dan Depsos harus menyerahtherimakan warga binaan kepada Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau kala itu). Hanya saja, yang terjadi setelah itu, terutama pascareformasi 1998, dalam praktiknya FKKS bersama beberapa pihak tetap membina Orang Laut secara informal

atau tanpa bantuan dana pemerintah (Prawirosusanto, 2014).

KAMPUNG BENTAM DAN “KEKERASAN INFRASTRUKTUR”

Analog dengan Li (2015) yang melihat bagaimana kekerasan bersifat infrastrukural terjadi di Kalimantan, persoalan serupa dapat kita saksikan dalam perubahan sejumlah aspek kehidupan Orang Laut akibat pembangunan infrastruktur Pulau Bentam. Transformasi sosial, budaya, dan ekonomi Orang Laut yang diangankan pemerintah melalui penyediaan sarana-sarana fisik tersebut memang tampak berhasil dalam beberapa bidang kehidupan. Namun, pada beberapa bidang kehidupan yang lain ternyata sama sekali tidak terjadi. Ini karena nalar orang darat sebagai latar belakang gagasan pembangunan itu cukup kuat. Indikasinya adalah pemaknaan, penerimaan, dan perlakuan Orang Laut terhadap sederet infrastruktur sebagai proyek pemberadaban (*to civilized*) itu berbeda dengan orang darat pada umumnya—meskipun mereka berupaya keras berlaku sebagaimana umumnya orang darat (Prawirosusanto, 2014, 156).

Hal itu sebenarnya tidak mengherankan. Sebab logika di balik pembangunan infrastruktur pada 1980-an adalah bagaimana caranya masyarakat terasing dapat hidup seperti “kita” (Prawirosusanto, 2014). “Kita” yang saya maksud adalah mereka yang duduk di kursi pemerintahan, para perancang pembangunan, para akademisi yang bekerja sebagai konsultan pembangunan, para rekanan swasta atau lembaga (yayasan) non-pemerintah, dan pihak-pihak dalam lingkaran itu. Hampir seluruhnya merancang kebijakan dari belakang meja, bukan berangkat dari realitas sehari-hari (Li, 2012, 1–56). Rancangan tersebut sifatnya juga berlaku umum dan diasumsikan dapat segera diaplikasikan di manapun pemerintah kehendaki (Li, 2007). Inilah “*governmentality*”. Pada bagian ini, dengan keterbatasan ruang, saya hanya akan menunjukkan satu contoh kekerasan infrastruktur dari sistem permukiman dan rumah dalam hubungannya dengan sistem kekerabatan (organisasi sosial) Orang Laut.

Mulanya, terdapat 14 rumah di Bentam yang dibangun oleh FKKS dan Depsos pada

awal 1990-an dalam konfigurasi rumah berjajar mengikuti jalan dari dermaga menuju ke pantai. Rumah-rumah tersebut saling berhadapan. Untuk mendapatkan satu dari 14 rumah tersebut, setiap keluarga Orang Laut harus mengambil nomor undian. Namun, seiring meningkatnya populasi kampung—karena ada beberapa keluarga Orang Laut yang datang menetap—jumlahnya bertambah menjadi 24 rumah. Penambahan jumlah ini membuat konfigurasi paralel seperti desain kampung awal tidak lagi berlaku. Rumah dibangun di tempat yang mereka sukai, dan sangat mudah mereka tinggalkan untuk membangun rumah baru di titik yang lain. Pada 2013, Bentam telah berkembang menjadi 40 rumah dengan jumlah penduduk 150 jiwa. Jumlah itu akan bertambah sebab beberapa orang merencanakan menikah dan mendirikan rumah baru, berpisah dari rumah orangtuanya.

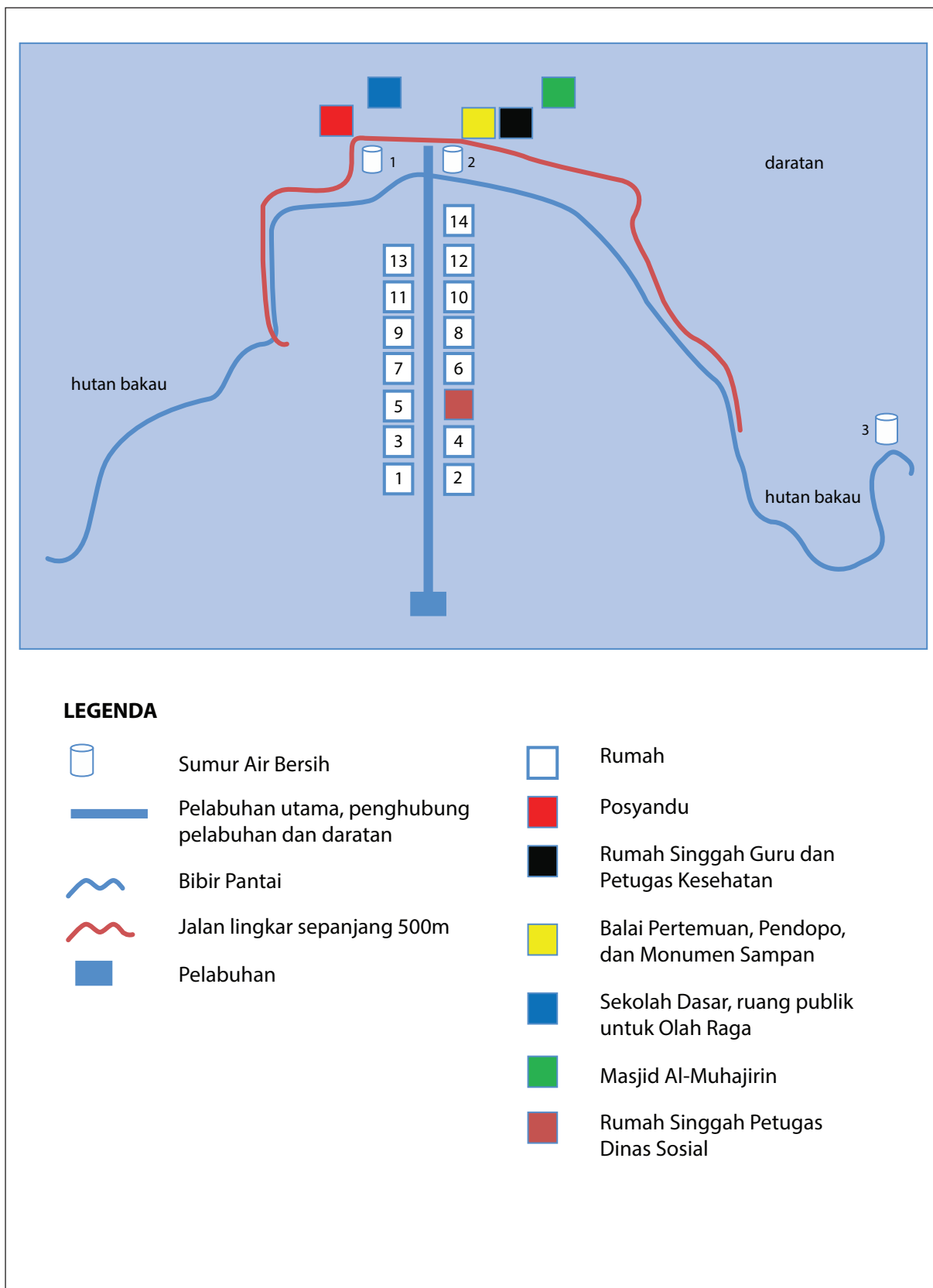
Kalau dikatakan mereka berpindah sesuka hati, hal itu tidak selamanya benar. Sebab mereka akan membangun rumah tidak jauh dari lingkaran kerabat dekatnya. Pemahaman Orang Laut atas konsep rumah bukan sebatas bangunan fisik yang berfungsi sebagai tempat tinggal belaka, melainkan lebih berdasarkan pada relasi kekerabatan tertentu (organisasi sosial). Philip Thomas (2010) mengatakan bahwa rumah dibedakan menjadi “*the house as built environment with the ‘house’ as a category and idea central to the conceptualization and practice of social relations.*” Hal ini punya riwayat panjang ketika mereka masih hidup berkelompok dan mengembara di laut. Bagi Orang Laut, kelangsungan hidup dan kekuatan *way of life* kelautan mereka digerakkan oleh sistem klasifikasi pemikiran mereka atas alam (lingkungan) laut dan darat (Ahimsa-Putra, 2006). Relasi Orang Laut dengan teritori (darat dan laut) tidak hanya menyangkut persoalan sumber daya alam sebagai bagian dari aktivitas ekonomi, melainkan juga terkait dengan konstruksi budaya material dan organisasi sosial.

Setelah mereka bermukim di Bentam, pemaknaan mereka atas budaya material sedikit berubah. Sampan, misalnya, sebagai satu elemen dalam organisasi sosial mereka tidak lagi berfungsi sebagai tempat tinggal. Dulunya, sampan punya dua fungsi yang tidak terpisahkan, yaitu sebagai tempat tinggal serta unit dan alat produksi. Se-

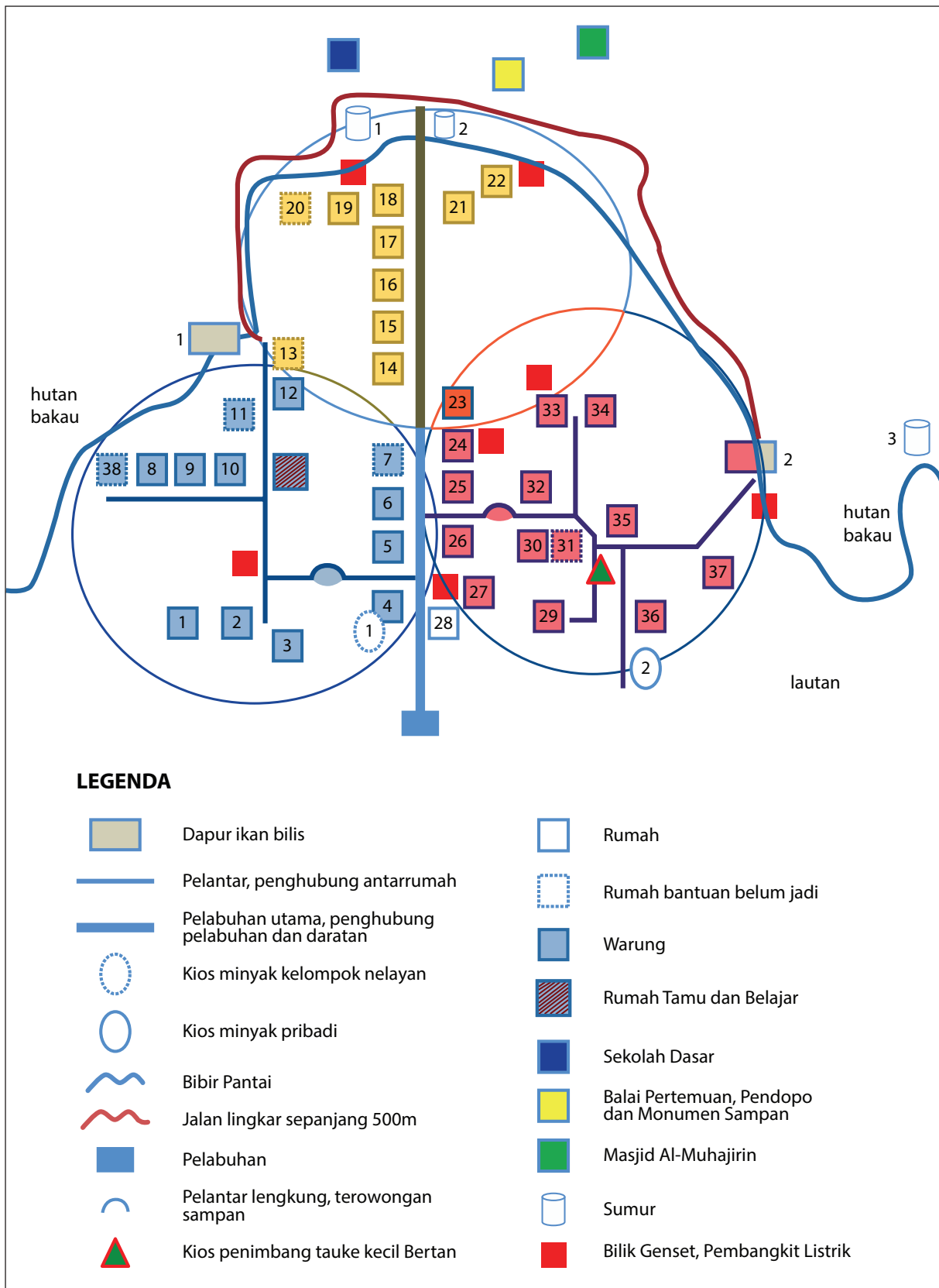
mentara itu, rumah atau pondok semula berfungsi sebagai tempat singgah sementara waktu di pulau tertentu (Sembiring, 1993). Program pemukiman mengubah fungsi-fungsi sampan dan rumah ini. Bergesernya sejumlah fungsi sampan ke dalam rumah inilah yang kurang lebih memengaruhi persepsi mereka atas kedua benda tersebut.

Pada diskusi sebelumnya, saya telah menunjukkan bahwa kampung Bentam dirancang dan diciptakan khusus melalui program PKMT untuk menampung beberapa komunitas Orang Laut di wilayah Kepri. Tujuannya agar mereka meninggalkan pola hidup berpindah. Dengan desain kampung Bentam seperti itu, lantas mengapa rancangan awal pemerintah yang tersusun sedemikian rapi berubah menjadi berantakan atau tidak beraturan? Dalam kaitannya dengan organisasi sosial, ada persepsi yang menurut saya relatif bertahan. Laiknya masih hidup mengembara secara berkelompok di laut, mereka ternyata tidak dapat melepaskan preferensi tinggal berdekatan dengan kelompok keluarga dekatnya. Pola permukiman Orang Laut di Bentam menjadi tampak khas karena *pola permukiman mengikuti preferensi figur pemimpin kelompok dan kekerabatan* (lihat Gambar 4 dan 5).

Pada akhir 1980-an, penghuni Bentam hanya enam keluarga batih. Masing-masing keluarga inti tersebut satu sama lain terhubung dengan kelompok keluarga luas. Kelompok pertama dipimpin oleh Mano, salah seorang *batin* (ketua) komunitas Orang Laut di perairan Pulau Boyan sampai Pulau Buluh. Mano saat itu ditunjuk oleh pemerintah dan FKKS sebagai *kepala kampung* pertama atau Ketua RT. Setelah rombongan pertama, enam keluarga lain menyusul dalam jangka waktu kurang dari tiga bulan. Sebagian dari enam keluarga baru ini juga masih ada hubungan kerabat dengan kelompok keluarga luas Mano (Bettarini, 1991, 85). Dalam rencana pembangunan permukiman di Bentam, rumah yang akan dibangun mencapai 100 unit dengan beberapa tahap pembangunan. Namun, rencana itu tidak pernah benar-benar terimplementasi. Memasuki tahun 1991, rumah yang dibangun di Bentam hanya bertambah 24 unit (Chou, 2010, 138). Saat ini, jumlah penduduk di Bentam hampir mencapai 40 keluarga. Perbandingan Gambar 4 dengan 5 menunjukkan perubahan



Gambar 4. Konfigurasi pemukiman Orang Laut desain pemerintah (denah tahun 1986–awal tahun 1990-an)



Gambar 5. Konfigurasi pemukiman Orang Laut menurut aliansi kekerabatan (denah tahun 2013)

formasi kampung Bentam dari pola pada akhir 1980-an ke pola pada 2013. Ini terjadi seiring pertambahan jumlah penduduk di Bentam. Tidak dapat dipungkiri, bertambahnya jumlah penduduk membuat orang memerlukan rumah-rumah baru.

Selain alasan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola permukiman juga berkenaan dengan pola perkawinan. Menurut Chou (2010), ada kewajaran di kalangan mereka untuk menikah, bercerai, lalu menikah kembali (*remarriage*). Apabila menikah, mereka akan membangun rumah baru yang bisa dihuni sementara waktu atau permanen. Ini bergantung pada kenyamanan mereka. Biasanya mereka lebih merasa nyaman jika tinggal berdekatan dengan kerabat dekatnya. Jika bercerai, rumah sangat mungkin ditinggal begitu saja atau dibongkar. Ketika menikah lagi, mereka akan membangun rumah baru di lokasi yang mereka sukai. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila formasi permukiman di Bentam tidak serapi desain yang dirancang pemerintah.

Sejarah bermukimnya Orang Laut di Bentam menarik untuk didiskusikan lebih jauh. Bukan soal kegagalan para perencana program membangun 100 rumah hunian, melainkan lebih pada ketidakpahaman pemerintah terhadap sistem organisasi sosial Orang Laut. Ketidaktahuan pemerintah atas hal ini ternyata justru menyebabkan, “...members of rival Orang Laut groups have been resettled on the same island” (Chou, 2010,138). Bayangkan saja, ketika beberapa kelompok yang tidak saling sejalan dipaksa untuk berada dalam permukiman yang sama. Saya kira pemerintah tidak pernah membayangkan bahwa hal ini dalam perjalanannya membawa implikasi sosial dan kultural dalam kehidupan mereka.

Pada Gambar 4 dan 5 kita dapat melihat bahwa pola permukiman yang tampak tidak beraturan hari ini ternyata memiliki dasar logikanya tersendiri—yang hanya bisa dipahami melalui sistem organisasi sosial Orang Laut. Pemerintah tidak menyadari bahwa ratusan Orang Laut yang tersebar di Kepri tidak tunggal dan homogen. Di antara mereka terdapat kelompok-kelompok yang berbeda. Oleh sebab itu, kebijakan pemukiman Orang Laut di akhir 1980-an sampai 1990-an justru membuat komunitas ini terjatuh ke dalam persoalan-persoalan sosial baru yang muncul

akibat gejala infrastruktur. Mengenai hal ini, Chou berpendapat sebagai berikut.

“the structural continuity of the village layout ... rest on the development of the families. ... As members of the village are kin, they share a deep emotional bonding. They are in contact with one another and live together. ... This is not to say that all members get along harmoniously with each other; nor that everyone regards the other with great warmth. What is an unspoken rule in the social organization and relations of the people, though, is a network steeped in obligations to help and share. Everyone observes this unspoken rule to show group solidarity.” (Chou, 2010,33).

Dari sini jelas terlihat bahwa terdapat hal-hal pokok dalam organisasi sosial Orang Laut, yaitu hubungan-hubungan jaringan kerabat mereka yang mengekspresikan perilaku pertukaran (*exchange*) (Chou, 2010, 33–35).

Sehubungan itu pula, apa yang terjadi pada masa lalu mengenai kedekatan kerabat menguat kembali dari potret letak rumah di Bentam. Gambar 5 menunjukkan hal itu dari balon-balon berwarna. Dalam catatan saya, setidaknya terdapat tiga kelompok kerabat yang berbeda. *Pertama*, kelompok keluarga dalam balon berwarna cokelat adalah kelompok keluarga rumah belakang, yaitu rumah Beloh yang dikelilingi oleh rumah anak dan menantunya, yaitu Akim dan Thomas. Begitu juga dengan Rahman yang diitari rumah Mustafa dan Tamel. Kelompok *kedua* dalam balon berwarna merah, yang di sana saling berdekatan antara rumah Mahadan, Seran, Juti, Alan, Titi, Rudi Simon, dan sebagainya. Kelompok *terakhir* dalam balon berwarna biru, yaitu lingkaran kerabat Mohtar yang rumahnya saling berdekatan, yaitu Adi, Slamet, dan Nenek. Keluarga lain yang berafiliasi dengan Mo juga berdekatan, yaitu rumah Ahu, Taher, Am, dan Bari.

Dalam kasus permukiman di Bentam, mengenai siapa membangun rumah di mana sebetulnya tidak menjadi persoalan. Namun, ternyata ada seorang yang mendengar laporan dari adiknya yang mengatakan bahwa pamannya akan melaporkan ke Sri Soedarsono soal penataan rumah di Bentam yang tidak lagi tertata dengan rapi, seperti Bentam tahun 1980-an. Menurut sang paman, dulu rumah-rumah di Bentam dibangun saling berhadapan sejalur

dengan pelantar pelabuhan menuju daratan, dan seharusnya kampung Bentam tetap seperti itu. Sama halnya dengan desain yang belum lama ini dibuat sebagai proposal renovasi kampung Bentam yang dibuat serupa dengan tatanan lama. Sang Paman merencanakan akan melapor ke Sri Soedarsono bahwa suami kemenakannya sebagai Ketua RT kampung tidak mampu mengatur warga hingga menyebabkan ketidaktertataan bangunan rumah-rumah di kampung. Mengenai hal ini, sang kemenakan menanggapi sebagai berikut:

“Kalaupun (Da) tuk benar melaporkan ke Ibu Dar, maka saya akan jelaskan (bahwa) seperti Taher, Ahu, dan Am memang atas maunya sendiri pindah rumah. *Same* seperti Datuk yang pindah rumah dari samping pelantar ke sisi ujung Barat pulau. Dulu, semasa Juti, Titi, dan beberapa anak Tuk masih kecil memang cukup tinggal satu rumah di situ. Tetapi, ketika mereka dewasa, dan satu demi satu menikah, rumah jadi penuh sesak. (Jadi) perlu rumah lain, dan ini berarti perlu tempat lain untuk dibangun rumah baru. Apa Tuk *lupe* dengan pengalaman diri dia sendiri?”

Si kemenakan menyangsikan keberatan pamannya. Apakah salah kalau orang memang ingin pindah dan membuat rumah di tempat lain. Di kampung ini, lanjutnya, tidak sama dengan kampung yang ada di darat dengan bangunan rumah di tanah yang mengikuti jalan kampung yang ada. Karena itu, tidak masuk akal kalau di Bentam harus diberlakukan seperti permukiman di atas tanah (daratan).

Persoalan pindah rumah ini menarik karena kebanyakan orang lebih memilih tinggal di muka laut dibandingkan membangun rumah di bibir pantai (darat). Masalahnya sederhana, jika air kering (surut), lokasi rumah di darat akan sangat jauh dari garis batas air laut. Garis batas ini adalah ujung pelabuhan. Dengan jauhnya rumah dari air laut, maka ketika air surut sampan mereka tidak dapat diparkir berdekatan dengan rumah mereka, melainkan harus diikat di tiang dekat pelabuhan. Baru setelah air mulai pasang, mereka menuju ke pelabuhan dan membawa sampan mereka masuk ke rumah.

Lain halnya dengan mereka yang memiliki rumah di muka laut. Mereka tidak perlu kerepotan memindahkan sampannya. Jika malam tiba, mereka dapat langsung beristirahat tanpa perlu

memindahkan sampannya seperti orang darat. Selain itu, mereka yang tinggal di muka laut tak ada keharusan bertegur sapa dengan orang lain. Berbeda dengan orang darat, yang dalam lalu-lintas sampannya di tengah kampung ada semacam keharusan untuk saling bertegur-sapa dengan orang yang rumahnya mereka lewati. Beberapa sentimen atau perseteruan menguat di kalangan orang Bentam. Penyebabnya tak jarang urusan sepele dan prasangka tanpa dasar yang jelas (kasak-kusuk, gosip, yang beredar di antara mereka). Jika semua orang di Pulau Bentam hendak tinggal di tepi laut, biaya pembangunan rumah yang ditanggung tidak sedikit. Untuk membangun rumah di tepi laut harus membuat tiang-tiang rumah yang kokoh, pelantar penghubung satu rumah ke rumah lain, dan sebagainya. Belum lagi jika bibir pantai itu penuh bakau, harus dibabat sampai bersih. Tidak semua warga Bentam mampu secara finansial untuk menyediakan material rumah dan ongkos tenaga tukang bangunan. Menyadari keterbatasannya, beberapa orang rela menerima lokasi rumah yang sudah ada atau menempel bibir pantai—meskipun tetap berkeinginan membangun rumah di muka laut.

Persoalan terkait infrastruktur juga muncul dalam kasus sumur—berhubungan dengan penguasaan atas sumber air tawar untuk minum dan memasak. Berkaitan dengan klaim teritori kekerabatan di atas, letak sumur menimbulkan konflik di kalangan mereka. Akibatnya, terjadi saling larang antara kelompok keluarga satu dan lainnya. Kemudian, ada pula masalah energi listrik dalam generator-set (genset). Mesin pembangkit ini berhubungan erat dengan munculnya utang-piutang baru karena sebagian besar keluarga Orang Laut tidak memiliki pembangkit sendiri. Mereka harus membayar ongkos bahan bakar kepada pemilik genset. Sering kali sebagian dari mereka (sebagai pelanggan) tidak mampu membayar. Semenjak bermukim di Bentam, kebutuhan hidup Orang Laut di darat bertambah, dan sebagian besar dari mereka menjadi terbiasa mendengarkan musik dangdut di radio dan menonton sinema televisi yang semuanya itu memerlukan listrik. Infrastruktur lainnya yang memunculkan masalah ialah masjid. Masjid tidak hanya tempat ibadah, melainkan menjadi ajang

perebutan pengaruh warga. Taman bermain anak Orang Laut yang tidak terpakai karena beberapa besi ayunan dan jungkat-jungkitnya dibongkar dan dijual kepada penampung besi bekas. Kini area itu dipenuhi semak belukar. Anak-anak Orang Laut lebih suka bermain di air seperti yang diteliti oleh Trisnadi (2002) tentang pendidikan anak di kalangan Orang Laut. Monumen Sampan, yang harapannya dipajang di kampung itu sebagai simbol keberhasilan modernisasi, justru dipreteli kayu-kayu dan besi-besi pengikatnya untuk dijual. Beberapa fasilitas tersebut tidak berguna bagi mereka karena memang nyatanya tidak diperlukan dalam keseharian Orang Laut.

Malfungsi, konflik dalam perebutan benda-benda itu, dan disharmoni sosial yang tercipta itu disebut kekerasan infrastruktur. Kekerasan infrastruktur adalah munculnya hal-hal yang bertolak belakang dari yang diimpikan, yang seharusnya difungsikan, dan yang dicita-citakan oleh penciptanya. Ini bukan karena mereka tidak bisa memanfaatkannya sebagaimana fungsinya, melainkan memang kadangkala beberapa perangkat atau benda tidak diperlukan dalam hidup manusia (Rogers & O'Neill, 2012, 403).

PENUTUP

Artikel ini telah mendiskusikan secara ringkas bagaimana proyek permukiman dirancang, diterapkan serta beberapa konsekuensi sosialnya. Proses ini saya jelaskan dengan konsep *governmentality* yang mewujudkan dalam dua macam aparatus, yakni manusia dan benda-benda. Selain itu, saya juga mencoba melihatnya dari hal yang lebih empiris, yaitu infrastruktur, khususnya permukiman. Menutup tulisan ini, saya ingin merefleksikan diskusi tersebut, berangkat dari klaim Ahimsa-Putra mengenai konsep teritori Orang Laut (atau di beberapa tempat disebut Orang Bajo):

“... (di Indonesia) orang Bajo merupakan satu-satunya suku bangsa yang tidak memiliki sebuah wilayah di daratan yang dapat mereka sebut sebagai “tanah Bajo”. Namun ... mereka memiliki kawasan pengembaraan (ter)luas di Indonesia, yang seluruhnya tertutup air ... sehingga *hanya* orang Bajo-lah sebenarnya yang memiliki “Tanah Air” dalam arti yang sebenarnya, karena *tanah mereka adalah wilayah perairan.*” (cetak miring

penekanan saya, Ahimsa-Putra, 2011, xi).

Kalimat “tanah orang Bajo adalah wilayah perairan” secara implisit mengutarakan gagasan pokok dalam nalar sekaligus realitas Orang Laut. Meski begitu, perlu dicatat bahwa gagasan tentang wilayah air ini berkaitan juga dengan gagasan mengenai wilayah darat. Satu dengan yang lain saling melengkapi walau kadang memunculkan kontradiksi dalam diri mereka sendiri (lihat Ahimsa-Putra, 2006).

Orang Laut di Bentan kini tidak lagi hidup mengembara. Sebagian besar kini menjalani perubahan tempat dan pola hidup yang berbeda dengan pendahulu mereka. Dahulu ada ungkapan “dunia Orang Laut selingkar sampan” karena merepresentasikan kehidupan mereka yang sederhana, tidak lebih dari untuk urusan bertahan hidup. Ahimsa-Putra (2011, iii–xiv) mengatakan, “semakin ‘sederhana’ hidup mereka, semakin lincah mereka bergerak di lautan, dan semakin mampu bertahan hidup. Sebaliknya, semakin ‘mewah’, lebih banyak harta, membuat mereka semakin sulit hidup di laut.” Dengan hidup menetap di rumah-rumah dalam kampung, dunia mereka kini tidak lagi selingkar sampan.

Governmentality negara yang mewujudkan melalui aparatus-aparatusnya dalam uraian ini tak hanya menciptakan warga negara yang tunduk lagi patuh, dan seolah berjalan atas kesadaran dirinya sendiri (Appadurai, 2002; Scott, 2005), tetapi juga tak berdaya. Orang Laut sebagai penduduk berkultur maritim, hidup di area pengembangan kawasan ekonomi global dan pembangunan nasional (Chou, 2010, 101–119) hampir mustahil bernegosiasi dengan negara. Akibatnya, mereka teralienasi oleh yang lebih digdaya (Chou, 2010, 40–41; Mubyarto, 1997). Secara struktural, pembangunan infrastruktur mengalienasi Orang Laut pada berbagai bidang, yaitu dipangkasnya peluang-peluang akses sumber daya alam (karena perebutan atas teritori tertentu), eksistensi struktur politik tradisional, dan kapasitas diri dalam mengartikulasikan identitas budayanya (Lenhart, 1997; Chou, 1997, 2010).

Premis bahwa pembangunan infrastruktur menjanjikan modernitas, perkembangan, kemajuan, kemerdekaan, dan sebagainya kini dipersoalkan secara kritis oleh sejumlah antropolog,

geografer, dan sosiolog. Hal itu terjadi karena kita lupa mempertimbangkan konsekuensi negatif dan juga mengingat sifat dasar infrastruktur itu sendiri penuh dengan kerentanan (Appel, Anand & Gupta, 2015). Sebagaimana yang pernah dialami oleh Orde Baru, pembangunan infrastruktur belum berpihak pada budaya maritim, terutama komunitas lokal. Proyek besar justru melahirkan manusia Indonesia yang dependen. Sedari awal, negara membalikkan konstruksi moral dan kultural mereka dengan menjadikan mereka sebagai kaum miskin, terbelakang, dan seterusnya. Padahal, fakta historis dan etnografis menunjukkan sebaliknya. Mereka memiliki sistem sosial mendasar yang kuat dalam mendukung keberlangsungan hidup mereka sebagai suku bangsa pengembara laut (pra-pemukiman) (Prawirosusanto, 2014). Selain itu, penting dicatat bahwa pembangunan maritim yang pernah dilakukan sangat bias pemikiran darat. Oleh karenanya, sebagai warga negara Indonesia tentu kita tidak ingin melihat pemerintah berlaku sebagai institusi tak berperikemanusiaan, sebagaimana kata Nietzsche dalam *Thus Spoke Zarathustra*: “state is the name of the coldest of all cold monsters”. Semoga saja.

PUSTAKA ACUAN

- Ahimsa-Putra, H.S. (2002). *Tanda, simbol, budaya dan ilmu budaya*. Makalah Ceramah Kebudayaan, diselenggarakan di Fakultas Ilmu Budaya, UGM, Yogyakarta, 13 Juni.
- Ahimsa-Putra, H.S. (2006). Analisis struktural dongeng Bajo. Dalam Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Lévi-Strauss: mitos & karya sastra* (pp.179–249). Yogyakarta: Kepel Press.
- Ahimsa-Putra, H.S. (2011). Tiga mitos tentang orang Bajo di Sulaho, Sulawesi Tenggara (Kata Pengantar). Dalam Nasruddin Suyuti, *Orang Bajo di tengah perubahan*. (pp. xi–xxvi). Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Ananta, A., E. N. Arifin & Bakhtiar. (2008). Chinese Indonesians in Indonesia and the Province of Riau Archipelago: A Demographic analysis. Dalam Leo Suryadinata (ed.), *Ethnic Chinese in contemporary Indonesia* (pp.17–47). Singapore: ISEAS Publications.
- Appadurai, A. (2002). Deep democracy: urban governmentality and the horizon of politics, *Public Culture*, 14(1), 21–47.
- Appel, H., Anand, N. & Gupta, A. (2015) Introduction: the infrastructure toolbox. Fieldsights- theorizing the contemporary. *Cultural Anthropology* Online, September 24, 2015, diakses dari <http://culanth.org/fieldsights/714-introduction-the-infrastructure-toolbox>.
- Barker J. (2005). Engineers and political dreams: Indonesia in the satellite age. *Current Anthropology*, 46(5),703–27.
- Bettarini, Y. (1991). *Dari hidup mengembara menjadi menetap: orang laut di Pulau Bertam, Kotamadya Batam, Provinsi Riau*. Skripsi sarjana Antropologi. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada.
- Chou, C. (1997). Contesting the tenure of territoriality: the Orang Suku Laut. Dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenskunde*, Riau in Transition, 153,(4), 605–629, Leiden.
- Chou, C. (2010). *The Orang Suku Laut of Riau, Indonesia: the inalienable gift of territory*. London: Routledge.
- Chou, C. & Wee, V. (2002). Tribality and globalization: the Orang Suku Laut and the “growth triangle” in a contested environment. Dalam G. Benjamin & C. Chou (eds.), *Tribal communities in the Malay world: historical, cultural and social perspectives* (pp.318–363). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Colchester, M. (1986). Unity and diversity: Indonesian policy towards tribal peoples. *The Ecologist*, 16 (2/3), 89–98.
- Direktorat Bina Masyarakat Terasing (DBMT). (1987a). *Data dan informasi pembinaan masyarakat terasing*. Jakarta: Direktorat Bina Masyarakat Terasing, Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Direktorat Bina Masyarakat Terasing (DBMT). (1987b). *Pola pembinaan kesejahteraan sosial suku laut di Batam: suatu konsep*. Jakarta: Direktorat Bina Masyarakat Terasing, Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RepublikIndonesia.
- Direktorat Bina Masyarakat Terasing (DBMT). (1987c). *Petunjuk pelaksanaan pola pembinaan kesejahteraan sosial Suku Laut di Batam*. Jakarta: Direktorat Bina Masyarakat Terasing, Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.

- Direktorat Bina Masyarakat Terasing (DBMT). (1987d). *Profil masyarakat terasing di Indonesia: Buku Satu*. Jakarta: Direktorat Bina Masyarakat Terasing, Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Direktorat Bina Masyarakat Terasing (DBMT). (1988a). *Pola operasional pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat terasing di daerah perbatasan: Riau*. Jakarta: Direktorat Bina Masyarakat Terasing, Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Direktorat Bina Masyarakat Terasing (DBMT). (1995). *Data dan informasi pembinaan masyarakat terasing*. Jakarta: Direktorat Bina Masyarakat Terasing, Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Dove, M. R. (1985). Pendahuluan. Dalam Michael R. Dove (ed.), *Peranan kebudayaan tradisional Indonesia dalam modernisasi* (pp. xv–Lviii). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ferguson, J. (2009). *The anti-politics machine: "development", depoliticization, and bureaucratic power in Lesotho*, [first printed 1994, Oxford University Press]. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Ferguson, J. & Gupta, A. (2005). Spatializing states: toward an ethnography of neoliberal governmentality. Dalam Jonathan Xavier Inda (ed.), *Anthropologies of modernity: foucault, governmentality, and life politics* (pp.105–131). Oxford, United Kingdom: Blackwell Publishing.
- Foucault, M. (1991). Governmentality. Dalam Burchell dkk. (eds.), *The foucault effect: studies in governmentality* (pp. 87–104). Chicago: University of Chicago Press.
- Gibbins, S. & Taylor, J. (2010). From rags to riches, the policing of fashion and identity: governmentality and what not to wear, *vis-à-vis*. *Explorations in Anthropology*, 10(1), 31–47.
- Gordon, C. (1991). Governmental rationality. Dalam Burchell dkk. (eds), *The foucault effect: studies in governmentality*. (pp.1–42). Chicago: University of Chicago Press.
- Haba, J. (2002). State, the 'isolated peoples' and development. *Masyarakat Indonesia, XXVIII* (1), 1–19.
- Harvey, P. (2015). *Materials fieldsights - theorizing the contemporary*, Cultural Anthropology Online, September 24, 2015. Diakses dari <http://culanth.org/fieldsights/719-materials>.
- Inda, J. X. (2005). Analytics of the modern: an introduction. Dalam Jonathan Xavier Inda (ed.), *Anthropologies of modernity: foucault, governmentality, and life politics* (pp. 1–20). Oxford, United Kingdom: Blackwell Publishing.
- Jiménez, A. C. (2008). Introduction: well-being's re-proportioning of social thought. Dalam Alberto Corsín Jiménez (ed.), *Culture and well-being: anthropological approaches to freedom and political ethics* (pp.1–34). London: Pluto Press.
- Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kota Batam. (2008). *Proposal pembangunan, pengembangan, dan peningkatan penghidupan Suku Laut Pulau Bertam*. Batam: KKKS.
- Larkin, B. (2013). The politics and poetics of infrastructure. *Annual Review of Anthropology*, 42, 327–43. doi: 1146/annurev-anthro-092412-155522.
- Larkin, B. (2015). *Form, Fieldsights - Theorizing the Contemporary*. *Cultural Anthropology Online*, September 24, 2015. Diakses dari <http://culanth.org/fieldsights/718-form>.
- Lenhart, L. (1997). Orang Suku Laut: ethnicity and acculturation. Dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenskunde*. Riau in Transition, 153, (4), 577–604. Leiden.
- Lenhart, L. (2002). Orang Suku Laut identity: the construction of ethnic realities. Dalam Geoffrey Benjamin & Chyntia Chou (eds.). *Tribal communities in the Malay world: historical, cultural and social perspectives*. (pp. 293–317). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Li, T.M. (2007). Governmentality. *Anthropologica*, 49, (2), 275–281. Diakses pada 25/04/2013 01:17 dari <http://www.jstor.org/stable/25605363>.
- Li, T.M. (2012). Pendahuluan: kehendak untuk memperbaiki. Dalam Tania Murray Li, *The will to improve: perencanaan, kekuasaan, dan pembangunan di Indonesia* (pp. 1–56). Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Li T.M (2015). *After the land grab: infrastructural violence and Indonesia's Oil Palm Zone*. Makalah konferensi Land grabbing, conflict and agrarian - environmental transformations: perspectives from East and Southeast Asia, 5–6 Juni 2015, Chiang Mai University.
- Mubyarto. (1995). Program IDT dan orang Suku Laut. *Kompas*, 17 Oktober, pp. 4.
- Mubyarto. (1997). Riau: progress and poverty. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenskunde*. *Riau in Transition*, 153, (4), 542–556. Leiden.
- Ong, A. (2005). Graduated sovereignty in South-East Asia. Dalam Jonathan Xavier Inda (ed.), *Anthropologies of modernity: foucault, governmentality, and life politics* (pp. 83–104). Oxford, United Kingdom: Blackwell Publishing.

- Ong, A. (2006). *Neoliberalism as exception: mutations in citizenship and sovereignty*. Durham, NC: Duke Univ. Press.
- Prawirosusanto, K.M. (2010). Orang Suku Laut dan Orang Melayu di Kepulauan Riau: sebuah tafsir deskriptif-etnografis. *Antropologi Indonesia*, 31, (3), September-Desember, 224–239.
- Prawirosusanto, K.M. (2014). *Menerima “Kepe-ngaturan” negara, membayangkan kemakmuran: etnografi tentang pemukiman dan perubahan sosial Orang Suku Laut di Kepulauan Riau*. Naskah tesis master studi antropologi. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Pascasarjana Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Rahardjo, M. D. (1986). Menguak mitos-mitos dalam pembangunan. Dalam M. Sastrapratedja, J Riberu & Frans M. Parera (eds), *Menguak mitos-mitos pembangunan: telaah etis dan kritis*, Bagian VI: Beberapa Pemikiran Tentang Etika Pembangunan (pp. 271–292). Jakarta: Penerbit PT. Gramedia.
- Rogers, D. & O’Neill, B. (2012). Infrastructural violence: introduction to the special issue. *Ethnography*, 13(4), 401–412. doi: 10.1177/1466138111435738.
- Schwenkel, C. (2015). *Sense, fieldsights-theorizing the contemporary*. *Cultural Anthropology Online*, September 24, 2015. Diakses dari <http://culanth.org/fieldsights/721-sense>.
- Scott, D. (2005). Colonial governmentality. Dalam Jonathan Xavier Inda (ed.), *Anthropologies of modernity: foucault, governmentality, and life politics* (pp. 23–49). Oxford, United Kingdom: Blackwell Publishing.
- Scott, J.C. (1998a). Rural settlement and production. Dalam James C. Scott, *Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed*, Part 3. *The social engineering of rural settlement and production* (pp. 181–192). New Haven: Yale University Press.
- Scott, J.C. (1998b). Soviet collectivization, capitalist dreams. Dalam James C. Scott, *Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed*. Part 3. *The social engineering of rural settlement and production* (pp. 193–222). New Haven: Yale University Press.
- Sembiring, S. (1993). Orang Laut di wilayah Kepulauan Riau-Lingga. Dalam Koentjaraningrat (ed.). *Masyarakat terasing di Indonesia* (pp.323–343). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soedarsono, S. (1992). Peranan Forum Komunikasi dan Konsultasi Sosial (F.K.K.S.) dalam pembinaan Suku Laut di P.Bertam-Kep.Riau. Dalam *Kumpulan Makalah I*, Seminar penanganan dan pemukiman kembali/rehabsos suku terasing di wilayah Irian Jaya, Jayapura 27–29 April.
- Thomas, P. (2010). House. Dalam Alan Barnard & Jonathan Spencer (eds.), *Encyclopedia of social and cultural anthropology*, – 2nd edition (pp. 353–357). Routledge.
- Trisnadi, W. (2002). *Anak-anak “Orang Laut” : tumbuh dewasa dalam budaya yang berubah*. Tesis master. Tidak dipublikasikan. Sekolah Pascasarjana Program Studi Antropologi, Jurusan Antropologi Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wee, V. & Chou, C. (1997). Continuity and discontinuity in the multiple realities of Riau. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. Riau in Transition*, 153, (4), 527–541 Leiden.
- Yayasan NEBA. (1988). *Stichting Nederland-Batam, terbevordering medischezorg Pulau Batam: project informatie*. Batam: Yayasan NEBA.

Surat kabar

Saat Orang Laut mengikuti alun ombak. (2013, Sabtu 23 Februari). *Kompas*, pp. 1, 15.

Laut sekarang tidak cukup lagi. (2013, Sabtu 23 Februari). *Kompas*, pp. 12.